



LAPORAN KEUANGAN BPSPL DENPASAR PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Gianyar, 31 Desember 2024

Kepala BPSPL Denpasar




Setiada Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

JLN. BY PASS PROF. IDA BAGUS MANTRA, PERING GIANYAR, BALI
TELEPON 0361-4794822, FAXIMILE 0361-4794821

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahunan Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gianyar, 31 Desember 2024

Kepala Balai,




Gerreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si
NIP. 19750303 200212 2 003

Laporan Keuangan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Periode Tahunan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode sampai 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.035.051.977 atau mencapai 319,48 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 950.000.000

Realisasi Belanja Negara pada periode sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 17.783.830.375 atau mencapai 98,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.095.987.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.18.917.467.211 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.071.303 dan Aset Tetap sebesar Rp.18.915.395.908,

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 18.288.017 dan Rp. 18.899.179.194.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.3.027.996.976, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 17.573.176.609 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (14.545.179.633). Jumlah Defisit/Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 7.055.001. Jumlah Defisit/Surplus dari Laporan Operasional sebesar Rp (14.538.124.632).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp.18.669.866.636 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (14.538.124.632) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.14.757.565.398 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.18.899.179.194.

5.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2024			ANGGARAN TA. 2023
		ANGGARAN	REALISASI	% Terhadap Anggaran	
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	950,000,000	3.035.051.977	319.48	3.052.288.384
JUMLAH PENDAPATAN		950,000,000	3.035.051.977	319.48	3.052.288.384
BELANJA	B.2	18,095,987,000	17,783,830,375	98.27	13,678,924,464
Belanja Pegawai	B.3	7,164,000,000	7,138,937,476	99.65	6,161,254,472
Belanja Barang	B.4	10,022,987,000	9,738,564,309	97.16	7,148,119,992
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
Belanja Modal	B.6	909,000,000	906,328,590	99.70	369,550,000
JUMLAH BELANJA		18,095,987,000	17,783,830,375	98.27	13,678,924,464

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	469,400	955,243	(485,843)	(50.86)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(2,347)		(2,347)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	467,053	955,243	(488,190)	(51.11)
Persediaan	1,604,250	665,000	939,250	141.24
JUMLAH ASET LANCAR	2,071,303	1,620,243	451,060	27.84
ASET TETAP				
Tanah	14,021,264,000	12,602,880,000	1,418,384,000	11.25
Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	4,624,287,162	1,164,099,706	25.17
Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	5,447,657,922	(1,404,296,222)	(25.78)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	302,116,000	302,116,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,239,732,660)	(4,291,752,040)	(947,980,620)	22.09
JUMLAH ASET TETAP	18,915,395,908	18,685,189,044	230,206,864	1.23
JUMLAH ASET	18,917,467,211	18,686,809,287	230,190,871	1.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	18,288,017	19,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
EKUITAS				
Ekuitas	18,898,712,141	18,669,866,636	228,845,505	1.23
JUMLAH EKUITAS	18,898,712,141	18,669,866,636	228,845,505	1.23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,917,000,158	18,686,809,287	230,190,871	1.23

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	7,139,892,719	6,160,300,732	979,591,987	15.902
Beban Persediaan	92,820,917	90,232,633	2,588,284	2.868
Beban Barang dan Jasa	3,631,481,118	2,602,682,166	1,028,798,952	39.528
Beban Pemeliharaan	450,269,230	445,798,808	4,470,422	1.003
Beban Perjalanan Dinas	5,265,377,570	3,812,009,925	1,453,367,635	38.126
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	299,021,590	198,407,547	100,614,043	50.711

Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	694,780,518	610,104,874	84,675,644	13.879
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,347	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN	17,573,176,609	13,919,536,695	3,653,639,914	26.248
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,545,179,633)	(10,877,510,673)	3,667,668,960	33.718
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(2,582,051)	2,582,051	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	8,555,999	(8,555,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	11,138,050	(11,138,050)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,055,001	1,767,916,363	(1,760,861,362)	(99.601)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,055,001	1,767,916,363	(1,760,861,362)	(99.601)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,055,001	1,765,334,312	(1,758,279,311)	(99.6)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.546
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.546

IV. LAPORAN PERUBAHAN ENTITAS

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR LAPORAN PERUBAHAN ENTITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Jumlah	%
1		2	3	4	5
EKUITAS AWAL	E.1	18,669,866,636	17,155,406,917	1,514,459,719	8.83
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		9,871,792	0	9,871,792	0
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi		0	0	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		9,871,792	0	9,871,792	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14,757,565,398	10,626,636,080	4,130,929,318	38.87
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		229,312,558	1,514,459,719	(1,285,147,161)	(84.86)
EKUITAS AKHIR	E.5	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Denpasar

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

UPT BPSPL Denpasar secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara struktural unit kerja BPSPL Denpasar berada pada struktur eselon III A yang membawahi 1 sub bagian umum serta Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Sumber Daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008.

BPSPL Denpasar diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran Sumber Daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAKTI ini diterapkan mulai tahun anggaran 2023 ini yang terdiri atas berbagai modul diantaranya Modul Admin, Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP (General Ledger dan Pelaporan). Aplikasi SAKTI ini dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan hasil dari modul-modul yang lain yang secara langsung terintegrasi data-datanya sehingga menghasilkan laporan keuangan.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan Sumber Daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar Sumber Daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk Sumber Daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar Sumber Daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Perubahan
Penerapan
Metode
Penilaian ke
First In First
Out

(11) Perubahan Penerapan Metode Penilaian Persediaan dari Harga Perkiraan Terakhir ke metode First In First Out (FIFO)

Sehubungan dengan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan, sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual (tahun 2015) hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam menilai persediaan. Selanjutnya, berdasarkan kajian atas implementasi metode HPT selama ini, serta dalam rangka kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO mulai tahun 2021. Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan penilaian persediaan. Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan

sosial (bansos); barang rusak/usang; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan. Pada prinsipnya, prosedur pencatatan, jenis transaksi, serta jurnal yang dihasilkan dari Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI sama dengan metode penilaian HPT. Namun demikian, hal-hal yang membedakan metode penilaian FIFO dari HPT antara lain:

- Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dapat diminimalkan.
- Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Persediaan dengan metode penilaian FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi Transfer Keluar tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana terjadi pada metode penilaian HPT.

Penerapan Metode Penilaian FIFO pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI Perubahan metode penilaian persediaan dari HPT menjadi FIFO diakomodasi Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- Saldo akhir persediaan dalam laporan keuangan tahun 2020 audited menjadi saldo awal persediaan tahun 2021.
- Harga perolehan terakhir persediaan pada tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2020 menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO.

Realisasi
Pendapatan Rp
3.035.051.977

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.035.051.977 atau mencapai 319,48 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.950.000.000. Pendapatan Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 31 DESEMBER 2024		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	950,000,000	6,390,720	0.67
Pendapatan Perizinan Lainnya		1,222,695,000	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya		1,798,911,256	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu		7,055,001	
Jumlah	950,000,000	3,035,051,977	319.48

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,56 % dibandingkan 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan per Periode Tahunan Tahun 2024 tidak terdapat penjualan peralatan dan mesin seperti tahun anggaran 2023. Nilai pendapatan negara bukan pajak sejumlah Rp 3.035.561.908 dengan rincian

1. Akun 425131 sebesar Rp 6.390.720 merupakan pendapatan atas tarif sewa rumah negara 2 pegawai selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024, kemudian pada bulan Juli hingga Oktober bertambah menjadi 3 pegawai dengan tarif Rp 363.687 atas nama Getreda M.H, Rp 155.325 atas nama Dikor Jupantara dan atas nama Elland Yuda dengan tarif Rp 155.325. Per bulan November kembali menjadi 2 pegawai hingga Desember tahun 2024.
2. Akun 425629 sebesar Rp 1.798.911.256 merupakan pendapatan jasa kelautan atas pungutan perdagangan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfaatannya dan atau dilarang ekspor (SIPJI).
3. Akun 425259 sebesar Rp 1.222.695.000 merupakan pendapatan perizinan lainnya atas rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dibatasi pemanfaatannya dan atau dilarang ekspor (SAJI).

4. Akun 425911 sebesar Rp 955.243 sebesar merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS, P3K dan pembayaran uang makan tahun anggaran 2023.
5. Akun 425912 sebesar Rp 6.099.758 merupakan pendapatan berupa penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu terdiri atas
 - ✓ pengembalian atas kelebihan pembayaran honor enumerator senilai Rp 1.000.000 pada tahun anggaran 2023
 - ✓ pengembalian atas pembayaran belanja pemeliharaan senilai Rp 400 pada tahun anggaran 2023
 - ✓ pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja barang operasional senilai Rp 390 pada tahun anggaran 2023
 - ✓ pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri an. Getreda M. Hehanussa tahun 2023 senilai Rp 5.098.908

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Alsln	-	8,555,999	-100.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6,390,720	4,992,108	
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,222,695,000	1,558,305,000	-21.54
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,798,911,256	1,478,728,914	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	955,243	1,503	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,099,758	1,704,860	257.79
Jumlah	3,035,051,977	3,052,288,384	-0.56

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.17.783.830.375*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp 17.783.830.375 atau 98,27 % dari anggaran belanja sebesar Rp.18.095.987.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	7,164,000,000	7,138,937,476	99.65
Belanja Barang	10,022,987,000	9,738,564,309	97.16
Belanja Modal	909,000,000	906,328,590	99.71
Total Belanja Kotor	18,095,987,000	17,783,830,375	98.27
Pengembalian Belanja		7,807	
Jumlah	18,095,987,000	17,783,822,568	98.27

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
berdasarkan sumber dana*

URAIAN SUMBER DANA KEGIATAN	PER 31 DESEMBER 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Rupiah Murni	14,510,987,000	14,251,047,163	98.21
Pinjaman Luar Negeri	1,660,000,000	1,656,253,604	99.77
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,925,000,000	1,876,529,608	97.48
Jumlah	18,095,987,000	17,783,830,375	98.27

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023, realisasi belanja Per 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 30,01 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan pangkat atau golongan pegawai, mutasi pegawai yang awalnya jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional khusus serta akselerasi pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,138,937,476	6,161,254,472	15.87
Belanja Barang	9,738,564,309	7,148,119,992	36.24
Belanja Modal	906,328,590	369,550,000	145.25
Jumlah	17,783,830,375	13,678,924,464	30.01

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp.7.138.937.476*

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7.138.937.476 dan Rp 6.161.254.472. Realisasi belanja Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,87 persen dibandingkan dengan dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya serta beberapa pegawai yang mengalami naik

pangkat/golongan serta beberapa pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional serta adanya tambahan 1 pegawai P3K.

BPSPL Denpasar terdiri dari 64 orang pegawai dengan rincian 47 orang PNS dan 14 orang pegawai PPNPM atau kontrak. Untuk tahun 2023 ini terdapat penambahan 2 orang pegawai BPSPL Denpasar yang berasal dari penerimaan PPPK dan mulai penempatan bekerja pada bulan Oktober 2023 dan 1 orang pegawai BPSPL Denpasar yang berasal dari penerimaan PPPK dan mulai penempatan bekerja pada bulan April 2024.

Tahun anggaran 2024 terdapat pengembalian belanja pegawai berjumlah Rp 2.271 dikarenakan pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 2.271 pengembalian ini melalui potongan SPM terdiri atas rincian sebagai berikut

- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 30 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0034A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 1.556 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0035A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 200 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0036A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 112 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0037A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 20 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0136A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 83 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0146A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 132 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0147A
- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 138 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0408A

- Pengembalian belanja berupa belanja pegawai pembulatan gaji PNS bernilai Rp 36 pengembalian ini melalui potongan SPM dengan nomer SPM 0466A

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI TA PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,651,020,410	6,021,085,206	10.46
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	332,219,373	73,040,413	354.84
Belanja Honorarium			#DIV/0!
Belanja Lembur	155,700,000	67,130,000	131.94
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	7,138,939,783	6,161,255,619	15.87
Pengembalian Belanja Pegawai	2,307	1,147	101.13
Jumlah Belanja	7,138,937,476	6,161,254,472	15.87

Belanja Barang
Rp.9.738.564.309

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2024 dan Per 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.132.711.773 dan Rp. 4.421.221.389. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 36,24 % dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2023. Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional (belanja bahan, belanja honor output kegiatan, barang non operasional, peralatan mesin ekstrakomptabel), belanja barang persediaan (barang konsumsi), belanja jasa (jasa langganan air, telepon, air, jasa sewa, jasa profesi dan belanja jasa lainnya), belanja pemeliharaan (gedung bangunan dan peralatan mesin), belanja perjalanan dinas hingga belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Terdapat belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan KOMPAK yang telah diserahkan terimakan kepada 3 kelompok yaitu Kelompok Sumbawa Grow Up, Kelompok Bua Lawah di Kabupaten Sumbawa dan Pokmaswas Desa Lewotobi di Nusa Tenggara Timur.

Hingga 31 Desember tahun anggaran 2024 terdapat pengembalian belanja barang atas kelebihan belanja keperluan perkantoran berjumlah Rp 5.500 dikarenakan pengembalian kelebihan belanja barang melalui setoran mandiri.

*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA 2024 dan Per 31 Desember
TA 2023*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	816,021,076	1,205,715,187	(32.32)
Belanja Barang Non Operasional	799,030,472	483,030,650	65.42
Belanja Barang Persediaan	93,760,167	90,484,133	3.62
Belanja Jasa	2,010,483,122	912,673,732	120.28
Belanja Pemeliharaan	450,269,230	445,798,808	1.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,269,984,152	3,758,979,807	40.20
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	299,021,590	53,030,128	463.87
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan	-	198,407,547	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	9,738,569,809	7,148,119,992	36.24
Pengembalian Belanja	(5,500)	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	9,738,564,309	7,148,119,992	36.24

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Tidak terdapat alokasi belanja bantuan sosial pada BPSPL Denpasar

*Belanja Modal
Tanah Rp.0*

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2024 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembelian tanah dikantor BPSPL Denpasar pada TA. 2024 tidak mendapatkan alokasi belanja modal tanah

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 878.592.590*

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp. 0. Nilai realiasasi belanja modal mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember TA 2023 sebesar Rp 0. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 878.592.590 atau sebesar 99,7 % dari total keseluruhan anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 881.264.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2024 dan Per 31 Desember TA 2023

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	878,592,590	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	878,592,590	0	#DIV/0!
Pengembalian		-	-
Jumlah Belanja	878,592,590	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.27.736.000*

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BPSPL Denpasar TA 2024 memiliki alokasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp 27.736.000 yang digunakan untuk renovasi kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Sidoarjo berupa perbaikan pondasi dan beton. Hingga sampai dengan periode laporan ini alokasi anggaran tersebut telah terealisasi 100%.

B.9 DIPA Awal dan Revisi Anggaran

Pada DIPA Awal Tahun 2024 ini BPSPL Denpasar memiliki anggaran Rp 16.435.987.000, DIPA Awal disahkan pada tanggal 24 November 2023. Dengan rincian sumber dana dari Rupiah Murni sebesar Rp 14.510.987.000 dan PNBP sebesar Rp 1.925.000.000. Kemudian ada tambahan anggaran berasal dari Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan LAUTRA sebesar Rp 1.660.000.000 jadi hingga 31 Desember BPSPL Denpasar memiliki anggaran sebesar Rp 18.095.987.000.

Pada Bulan Januari 2024 melakukan Revisi POK 1 yang didalamnya mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan tanggal 9 Januari 2024 dan Revisi 2 DIPA 1 yang didalamnya mengakomodir buka blokir untuk kegiatan pengadaan perangkat pengolah data tanggal 26 Januari 2024.

Pada Bulan Februari 2024 melakukan Revisi 3 DIPA 2 POK yang didalamnya mengakomodir revisi penarikan dana untuk Triwulan I Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024.

Pada bulan April 2024 BPSPL Denpasar telah melakukan revisi ke 4 merupakan revisi DIPA 3 yang memuat revisi Halaman III DIPA triwulan II tanggal 24 April 2024. Serta revisi ke 5 merupakan revisi POK 2 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 April

2024.

Pada bulan Juni 2024 BPSPL Denpasar telah melakukan revisi ke 6 merupakan revisi DIPA 4 yang memuat revisi Halaman III DIPA tanggal 4 Juni 2024. Revisi ke 7 merupakan revisi POK 3 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 7 Juni 2024. Serta revisi ke 8 yang merupakan revisi DIPA 4 yang memuat buka blokir Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp 200.000.000 tanggal 20 Juni 2024.

Pada bulan Juli BPSPL Denpasar melakukan revisi ke 9 yang merupakan revisi DIPA 6 yang memuat revisi Halaman III DIPA tanggal 15 Juli 2024. Kemudian revisi ke 10 merupakan revisi POK 4 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 5 Agustus 2024. Lalu revisi ke 11 yang merupakan revisi DIPA 7 yang memuat adanya tambahan dana kegiatan LAUTRA pada tanggal 27 Agustus 2024. Serta revisi ke 12 merupakan revisi POK 5 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 September 2024.

Pada bulan Oktober BPSPL Denpasar melakukan revisi ke 13 merupakan revisi POK 6 tanggal 5 Oktober 2024 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan, kemudian di tanggal 16 Oktober 2024 melakukan Revisi DIPA yang memuat revisi Halaman III DIPA dan melakukan revisi POK 7 tanggal 23 Oktober 2024.

Pada bulan November dilakukan revisi pemutakhiran KPA yang disahkan pada tanggal 22 November 2024. Pada tanggal 25 November 2024 dilakukan revisi DIPA yang memuat mengenai revisi penghematan perdin. Pada tanggal 10 Desember dilakukan revisi pemutakhiran KPA, pada tanggal dilakukan revisi POK 8 tanggal 22 Desember 2024 yang mengakomodir pergeseran anggaran antar jenis belanja untuk pelaksanaan kegiatan dan revisi POK 9 tanggal 24 Desember 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.-

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-24	31-Dec-23
Saldo UP RM	-	-
Saldo UP PNB	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp. 469.400

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 469.400 dan Rp. 955.243. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak senilai Rp 469.400 merupakan nilai dari temuan audit internal. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	469,400	955,243
Jumlah	469,400	955,243

Penyisihan
Tidak Tertagih
Rp. (2.347)

Piutang

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (2.347) dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan adangan yang dibuat untuk memperkirakan potensi piutang PNB yang tidak dapat ditagih. Cadangan ini membantu memperlihatkan kondisi keuangan secara lebih realistis dengan mencerminkan potensi kerugian dari

piutang yang mungkin tidak dapat dipungut. Nilai sebesar Rp (2.347) merupakan angka penyisihan dari temuan audit internal. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,347)	955,243
Jumlah	(2,347)	955,243

C.4 Persediaan

Persediaan
Rp. 1.604.250

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.604.250 berupa kertas HVS Sidu A4 80 gram sebanyak 11 RIM dan tinta printer Epson sejumlah 4 botol, ballpoint standar 1 lusin dan post it 10 buah. Sisa saldo persediaan ini terdiri dari saldo awal Rp665.000 ditambah mutasi tambah sebesar Rp392.781.757 dikurangi mutasi kurang sebesar Rp391.842.507. Adapun mutasi tambah berasal dari pembelian barang konsumsi untuk operasional BPSPL Denpasar dan pembelian bantuan KOMPAK, sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya pemakaian barang konsumsi operasional dan transaksi penyerahan kepada masyarakat. Adapun penjelasan atas transaksi diserahkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Transaksi Penyerahan kepada Masyarakat antara lain berupa:

117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/PEMDA berupa :

- a. Bantuan Konservasi senilai Rp97.780.000 telah diserahterimakan kepada POKMASWAS Bua Lawah yang berlokasi di Dusun Pinamin, Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berupa BCD set, paket alat selam dasar, weightbelt, pemberat, kamera bawah laut dan laptop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 3131/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

- b. Bantuan Konservasi senilai Rp101.920.000 telah diserahkan kepada Lembaga Sumbawa Grow Up yang berlokasi di Lintas Baberas PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat berupa paket alat selam dasar, Dive computer, compressor dan laptop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.3161/BPSPL.4/PL.440/IV/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- c. Bantuan Konservasi senilai Rp99.321.590 telah diserahkan kepada Ketua POKMASWAS Desa Lewotobi yang berlokasi di desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berupa paket kapal fiber, mesin kapal, paket selam dasar, teropong binocular, topi, rompi, kamera. Laptop, sebtar, dry bag dan sd card sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.4456/BPSPL.4/PL.440/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Nilai perbandingan Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<i>Rincian Persediaan</i>		
Persediaan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Barang Konsumsi	1,604,250	665,000
Jumlah	1,604,250	665,000

Tanah

Rp.14.021.264.000

C.5 Tanah

Nilai aset Tanah pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.021.264.000. Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 2.400m² dengan nilai sebesar Rp12.602.880.000 dan nilai dari transaksi perolehan saldo awal atas tanah dari Kantor Wilker Jawa Timur (Sidoarjo) berdasarkan dari penilaian KPKNL Sidoarjo nomor Lap-0320/1/PRO-01/KNL.1/2/01.01.11/2024 senilai 1.418.384.000 dengan total luas tanah sebesar 135m². Pada periode tahun anggaran 2024 terdapat mutasi tambah dari hasil penilaian KPKNL, namun tidak terjadi mutasi kurang pada aset tanah. Dari jumlah atau nilai tanah di atas, digunakan untuk operasional Satker BPSPL Denpasar sebagai lokasi bangunan kantor yang berlokasi di Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra KM.16,5 Desa Pering Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dan digunakan sebagai kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur yang berlokasi di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan

Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Barang Milik Negara berupa tanah yang berlokasi di Gianyar tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.10 yang dikeluarkan Instansi terkait dengan nama Pemegang Hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sedangkan untuk BMN berupa tanah yang berlokasi di Sidoarjo memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.294.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<i>Rincian Tanah</i>			
No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.400 m2	Jln. By. Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Pering, Gianyar- Bali	12,602,880,000
2	135 m2	Ruko Surya Inti Permata, Sidoarjo Jawa Timur	1,418,384,000
			14,021,264,000

C.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp. 5.788.386.868

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5,788,386,868 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp4.659.427.982, mutasi transaksi transfer masuk online dari Satker BPSPL Makassar sebesar Rp28.900.000, transfer masuk dari Setditjen PKRL senilai Rp.184.406.500, transfer masuk dari Loka Riset Perikanan tuna senilai Rp.92.899.616, transaksi masuk dari pembelian asset peralatan dan mesin selamat tahun 2024 senilai Rp.878.592.590 serta belanja barang ekstrakomptabel senilai Rp.135,839,203. Nilai realisasi penambahan aset dari belanja modal berupa pengadaan lemari besi, lemari kayu, mesin presensi sidik jari, meja kerja, kursi kerja, springbed, meja makan, sofa, lemari es, mesin cuci, AC, televisi, soundsystem, kamera digital, telepon lapangan, GPS, laptop dan scanner sedangkan nilai realisasi belanja barang ekstrakomptabel yang membentuk aset ekstrakomp berupa pengadaan laci nakas meja, meja kerja, tangga, dispenser, CCTV dan gordyn. Adapun sampai dengan periode 31 Desember 2024 ini terdapat mutasi kurang sebesar Rp20.699.000, mutasi kurang tersebut terjadinya karena adanya transaksi transfer keluar BMN dari Satker BPSPL Denpasar ke BPSPL Makassar sesuai dengan Berita Acara Transfer Online BMN nomor B.1934/BPSP.4/PL.450/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan transfer keluar BMN dari BPSPL Denpasar ke Satker Setditjen PKRL senilai Rp.64.722.092.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2023	Rp4.624.287.162
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	Rp1.014.431.793
- Transfer Masuk	Rp306.206.116
Mutasi Kurang	
- Transfer Keluar	Rp85.421.092
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 5.788.386.868
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Rp(5.239.732.660)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp548.654.208

C.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp. 4.043.361.700

Saldo Gedung dan bangunan tempat tinggal pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp700.018.000 sejumlah 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp853.346.222 ditambah dengan jumlah penambahan unit dari transaksi mutasi tambah. Adapun mutasi tambah sebesar Rp 27.736.000 yang merupakan penambahan nilai Gedung dan bangunan untuk renovasi kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Sidoarjo berupa perbaikan pondasi dan beton, selain itu mutasi tambah terjadi karena adanya perubahan nilai perolehan atas hasil perolehan tim KPKNL Denpasar yang mengakibatkan adanya transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp265.090.000, sedangkan mutasi kurang yang terjadi selama 1 Januari sd 31 Desember 2024 merupakan perubahan nilai rumah negara berdasarkan hasil penilaian tim KPKNL Denpasar sebesar Rp418.418.222. Nilai tersebut merupakan nilai Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5,447,657,922
Mutasi Bertambah	
Perolehan Lainnya Aset Eks BPPN Kemenkeu	-
Penambahan Nilai Gedung Bangunan	27,736,000
Mutasi Bertambah	
Koreksi Perubahan Nilai Tambah	265,090,000
Mutasi kurang:	
Koreksi Perubahan Nilai Berkurang	1,697,122,222
Saldo per 31 Desember 2024	4,043,361,700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	500,521,725
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3,542,839,975

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.302.116.000

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp302.116.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp302.116.000. Adapun selama periode 31 Desember 2024 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada kelompok Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	302,116,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	302,116,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	283,136,600
Nilai Buku per 31 Desember 2024	18,979,400

Aset Tetap Lainnya
Rp.0

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya pada BPSPL Denpasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00, dan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.0

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pada periode 31 Desember 2023 tidak terdapat transaksi kurang atau transaksi tambah konstruksi dalam pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan
Rp.(5.239.732.660)

C.11 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(5.239.732.660) dan Rp.(4.291.752.040). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	(4,456,074,335)	1,254.493.419
2	Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	(500,521,725)	4.840.072.425
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.116.000	(283.136.600)	37,958,800
4	Aset Tetap YTDDOP		0	0
	Akumulasi Penyusutan	10,884,143,838	(5.239.732.660)	6,132,524,644

C.12 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp.0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Pengelolaan tidak terdapat saldo ATB. BPSPL Denpasar tidak memiliki aset tidak berwujud.

C.13 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp.0

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Pada Satker BPSPL Denpasar sampai dengan periode 31 Desember 2024 tidak terdapat saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan

C.14 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp 18.288.017*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 18.288.017 dan Rp 16.942.651. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang

dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Pembayaran Telepon	7,106,645	Di bayarkan bulan Januari 2025
Beban Pembayaran Listrik	10,397,872	Di bayarkan bulan Januari 2025
Beban Pembayaran Air	783,500	Di bayarkan bulan Januari 2025
Total	18,288,017	

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 18.899.179.194 dan Rp 18.669.866.636. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas

Rp.18.899.179.194

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp.3.027.996.976

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.027.996.976 dan Rp 3.042.026.022. Rincian Pendapatan telah dijelaskan dalam rincian dibawah ini :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6,390,720	4,992,108	28.02
Pendapatan Perizinan Lainnya	1,222,695,000	1,558,305,000	(21.54)
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	1,798,911,256	1,478,728,914	21.65
Jumlah	3,027,996,976	3,042,026,022	(0.46)

Terdapat perbedaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan kembali berupa belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 955.243 dan penerimaan kembali berupa belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 6.099.758.

Beban Pegawai
Rp.7.139.892.719

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.139.892.719 dan Rp. 6.160.300.732. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terdapat kenaikan sebesar 15,90 % dibanding Desember 2023 dikarenakan antara lain oleh adanya serta beberapa pegawai yang mengalami naik pangkat/golongan serta beberapa pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional serta adanya tambahan 1 pegawai P3K.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,307,744,500	2,102,701,500	9.75
Beban Pembulatan Gaji PNS	38,687	40,988	(5.61)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2,307)	(1,147)	101.13
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	118,795,220	115,320,520	3.01
Beban Tunj. Anak PNS	32,994,994	29,429,398	12.12
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	238,120,000	248,230,000	(4.07)
Beban Tunj. PPh PNS	15,599,055	3,167,549	392.46
Beban Tunj. Beras PNS	105,443,520	105,660,780	(0.21)
Beban Uang Makan PNS	255,115,000	260,434,000	(2.04)
Beban Tunjangan Umum PNS	53,635,000	52,050,000	3.05
Beban Gaji Pokok PPPK	123,316,800	25,102,000	391.26
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,120	324	554.32
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,329,360	1,186,600	601.95
Beban Tunjangan Anak PPPK	1,665,872	237,320	601.95
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,940,000	3,910,000	384.40
Beban Tunjangan Beras PPPK	6,662,640	1,231,140	441.18
Beban Uang Makan PPPK	14,411,000	5,222,000	175.97
Beban Uang Lembur	155,700,000	67,130,000	131.94
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3,499,280,177	3,077,906,231	13.69
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	158,901,081	36,141,529	339.66
Jumlah	7,139,892,719	6,160,300,732	15.90

Terdapat selisih belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban pegawai pada Laporan Operasional senilai Rp 955.243 dikarenakan adanya pengembalian belanja berupa belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

*Beban Persediaan
Rp 92.820.917*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 92.820.917 dan Rp. 90.232.633. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2024	Per 31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	92.820.917	90.232.633	(6,144)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-

Terdapat perbedaan belanja persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban persediaan Laporan Operasional dikarenakan selisih antara saldo awal tahun 2024 persediaan senilai Rp 665.000 dan saldo akhir tahun persediaan senilai Rp 1.604.250.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.3.631.481.118*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.631.481.118 dan Rp. 2.602.682.166. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa barang konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban barang dan jasa terjadi karena adanya penambahan pegawai di Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2024	Per 31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	466,009,989	847,674,270	(45.02)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(5,500)	10,496,720	(100.05)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,696,420	174,408,000	(92.15)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,912,000	163,645,565	(42.61)
Beban Barang Operasional Lainnya	242,402,667	9,490,632	2,454.13
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	201,973,765	(100.00)
Beban Bahan	417,509,437	236,200,000	76.76
Beban Honor Output Kegiatan	216,604,000	36,020,585	501.33
Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,077,832	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	135,839,203	8,836,300	1,437.29
Beban Langganan Listrik	185,171,652	129,328,787	43.18
Beban Langganan Telepon	111,520,962	101,038,845	10.37
Beban Langganan Air	12,294,500	5,204,610	136.22
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	8,231,539	(100.00)
Beban Sewa	679,975,500	571,566,800	18.97
Beban Jasa Profesi	297,530,582	14,550,000	1,944.88
Beban Jasa Lainnya	729,941,874	82,740,748	#####
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,275,000	(100.00)
Jumlah	3,631,481,118	2,602,682,166	39.53

Terdapat selisih belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban barang dan jasa pada Laporan Operasional dikarenakan adanya koreksi SPM pada belanja jasa profesi senilai Rp 4.606.582 dan selisih belanja akrual langganan listrik, air dan telepon antara tahun 2023 dan 2024.

Beban
Pemeliharaan
Rp.450.269.230

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 450.269.230 dan Rp. 445.798.808. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk beban pemeliharaan gedung dan bangunan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor diantaranya mengecat dinding, memperbaiki atap yang bocor dan kusen. Untuk beban pemeliharaan peralatan dan mesin digunakan untuk pemeliharaan servis laptop, alat selam, tv dan kendaraan bermotor. Tidak terdapat perbedaan belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248,906,926	210,258,114	18.38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201,362,304	232,543,194	(13.41)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	2,997,500	(100.00)
Jumlah	450,269,230	445,798,808	1.00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.5.265.377.570

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.265.377.570 dan Rp 3.812.009.935. Perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 38,13% hal ini disebabkan dengan adanya penambahan pegawai pada BPSPL Denpasar serta adanya penambahan pagu anggaran yang signifikan dari tahun 2023 dan 2024. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terdapat perbedaan belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional senilai Rp 4.606.582 yang merupakan adanya koreksi SPM. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 DESEMBER TAHUN 2024	PER 31 DESEMBER TAHUN 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,575,713,730	2,285,781,518	12.68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	166,609,000	97,560,568	70.77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,975,000	7,315,000	50.03
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	53,030,128	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,512,079,840	1,368,322,721	83.59
Jumlah	5,265,377,570	3,812,009,935	38.13

D.7 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 299.021.590*

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 299.021.590 dan Rp. 198.407.547. Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 jika dibandingkan mengalami kenaikan sebesar 50,71 persen. Hal ini disebabkan jika di tahun anggaran 2023 kelompok yang diberikan bantuan sebanyak 2 kelompok, namun di tahun 2024 ini kelompok yang diberikan bantuan sebanyak 3 kelompok. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Tidak terdapat perbedaan belanja barang yang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Laporan Operasional.

Transaksi penyerahan kepada Masyarakat merupakan keluarnya persediaan dalam rangka :

- Pemberian Bantuan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- Penyerahan persediaan yang akan menjadi Aset Tetap/Lainnya pada Barang Milik Negara (BMD) Pemerintah Daerah melalui dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, dan sebagainya.

Pada satker BPSPL Denpasar transaksi penyerahan kepada masyarakat sampai dengan periode 31 Desember 2024 berupa :

- Bantuan Konservasi senilai Rp97.780.000 telah diserahkan kepada POKMASWAS Bua Lawah yang berlokasi di Dusun Pinamin, Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berupa BCD set, paket alat selam dasar, weightbelt, pemberat, kamera bawah laut dan laptop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor

3131/BPSPL.4/PRL.440/VI/2024 tanggal 27 September 2024.

2. Bantuan Konservasi senilai Rp101.920.000 telah diserahkan kepada Lembaga Sumbawa Grow Up yang berlokasi di Lintas Baberas PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat berupa paket alat selam dasar, Dive computer, compressor dan laptop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.3161/BPSPL.4/PL.440/IV/2024 tanggal 28 September 2024.
3. Bantuan Konservasi senilai Rp99.321.590 telah diserahkan kepada Ketua POKMASWAS Desa Lewotobi yang berlokasi di desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berupa paket kapal fiber, mesin kapal, paket selam dasar, teropong binocular, topi, rompi, kamera. Laptop, senter, dry bag dan sd card sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor B.4456/BPSPL.4/PL.440/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember Tahun 2024	Per 31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	299,021,590	198,407,547	50.71
Jumlah	299,021,590	198,407,547	50.71

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 694.780.518

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 694.780.518 dan Rp 610.104.874. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember Tahun 2024	Per 31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	568,899,678	475,521,510	19.64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,922,040	96,624,564	(9.01)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	37,958,800	37,958,800	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	694,780,518	610,104,874	13.88

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 2.347*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.347 dan Rp.0 merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih berasal dari temuan audit internal.

*Beban Lain-lain
Rp.0*

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
7.055.001

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Per 31 Desember Tahun 2024 surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 7.005.001 dan Per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp 1.765.334.312. Terdapat nilai Rp 7.005.001 merupakan pengembalian belanja atas setoran satker BPSPL Denpasar berupa pengembalian kelebihan belanja barang sebesar Rp 6.099.758. Serta senilai Rp 955.243 yang pengembalian kelebihan belanja pegawai. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus / Defisit Pelepasan Aset	0	(2,582,051)	(100.00)
Surplus / Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,005,001	1,767,916,363	(99.60)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7,005,001	1,765,334,312	(99.60)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp. 18.669.866.636

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.18.669.866.636 dan Rp. 17.155.406.917.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp.
(14.538.124.632)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (14.538.124.632) dan Rp. (9.112.176.361). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukannya penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.(9.871.792)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (9.871.792) dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap yang diakibatkan karena adanya penilaian dari KPKNL Denpasar atas asset rumah negara yang semula terdiri 1 NUP dilakukan penilaian kembali menjadi 3 NUP serta penilaian dari KPKNL Sidoarjo atas pemisahan nilai tanah dan gedung bangunan kantor pelayanan BPSPL Denpasar wilayah kerja Jawa Timur.

Koreksi Lain - Lain
Rp.0

E.3.5. Koreksi Lain - Lain

Koreksi Lain- Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp.14.757.565.398

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 14.757.565.398 dan Rp 10.626.636.080. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas sebesar Rp 14.757.565.398 terdiri dari :

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	Per 31 Desember Tahun 2024	Per 31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	17,783,830,375	13,678,924,464	30.01
Diterima dari Entitas Lain	(3,035,051,977)	(3,052,288,384)	(0.56)
Transfer Masuk	8,787,000	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	14,757,565,398	10,626,636,080	38.87

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 7,881,393,333, sedangkan DDEL sebesar minus Rp1,549,196,532

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Adapun transaksi transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp85.421.092 yang merupakan transfer keluar atas 1 unit laptop dari BPSPL Denpasar ke BPSPL Makassar sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor 1934/BPSPL.4/PL.450/VI/2024 tanggal 4 September 2024 sebesar Rp20.699.000, dan transfer keluar ke Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp64.722.092 berupa 8 unit kursi besi/metal serta 2 unit Sice sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor 220/DJPKRL.1/PL.760/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai	Keterangan
Transfer Keluar	BPSPL Makassar (477431)	20.699.000	Laptop Apple Macbook Gray NUP 50
Transfer Keluar	Setditjen PKRL (622145)	64.722.092	- kursi besi/metal NUP 431-438 - Sice NUP 9-10
Jumlah		85.421.092	

Sedangkan untuk transaksi transfer masuk sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp306.206.116 yang merupakan transfer masuk atas 1 unit laptop dari BPSPL Makassar ke BPSPL Denpasar sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor B.1050/BPSPL.3/PL.760/VI/2024 tanggal 4 September 2024 sebesar Rp28.900.000, transaksi transfer masuk dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp82.027.092 berupa 3 unit lemari kayu, 2 unit rak kayu, 1 meja kerja kayu, 8 unit kursi besi/metal serta 2 unit Sice sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor 220/DJPKRL.1/PL.760/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, transaksi masuk dari Satker Loka Riset Perikanan Tuna sebesar Rp92.899.616 berupa 6 unit lemari besi/metal, 3 unit rak besi, 2 unit filling cabinet, 1 unit meja receptionis, 1 unit background, dan 1 unit buffet sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor B.384/LRPT/PL.760/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, serta transaksi transfer masuk dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp167.101.500 berupa 1 unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza sesuai dengan Berita Acara Transfer nomor KPB.345/DJPKRL.1/PL.750/XI/2024 tanggal 15 November 2024.

Jenis	Entitas Asal	Nilai	Keterangan
Transfer Masuk	BPSPL Makassar (477431)	28.900.000	Laptop Lenovo Yoga Slim NUP 49
Transfer Masuk	Setditjen PKRL (622145)	82.027.092	- lemari kayu NUP 81, 82, 84 - rak kayu NUP 105, 107 - meja kerja kayu NUP 297 - kursi besi/metal NUP 431-438 - Sice NUP 9-10
Transfer Masuk	Loka Riset Perikanan Tuna	92.899.616	- Lemari besi/metal NUP 12-15, 18, 20 - Rak besi NUP 1,3 dan 4 - Filling cabinet NUP 6 dan 10 - Meja receptionis NUP 1 - Background NUP 2 - Buffet NUP 1
Transfer Masuk	Setditjen PKRL (622145)	167.101.500	- Mini bus (kendaraan roda empat) NUP 49
Jumlah		306.206.116	

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
NIHIL	NIHIL	0
Total Pengesahan	NIHIL	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	NIHIL	0
Jumlah		0

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.18.899.179.194

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.899.179.194 dan Rp. 18.669.866.636.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan November tahun 2024 Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan arahan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas. Melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut satker diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing satuan kerja. Satuan Kerja melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. Berkoordinasi dengan unit eselon I Kementerian/Lembaga dalam melakukan revisi pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- ✓ BPSPL Denpasar pada bulan Agustus tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang sumber anggarannya dari PHLN berupa kegiatan Oceans for Prosperity Project – Lautra sebesar Rp 1.660.000.000
- ✓ Terdapat jurnal balik atas penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya kelebihan pembayaran belanja pegawai senilai Rp 955.243 dengan rincian transaksi berasal dari
 1. Rp 205.743 dari Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja PNS) BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023
 2. Rp 9.500 dari Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja P3K) BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023
 3. Rp 740.000 dari Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai (Uang Makan PNS) BPSPL Denpasar Bulan Desember 2023

- ✓ Terdapat Jurnal Penyesuaian atas penyesuaian pada aplikasi SAKTI Modul GLP dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar selama bulan Desember dan dibayarkan pada Tahun anggaran 2025 senilai Rp. 18.288.017 dengan rincian transaksi berasal dari :

1. Rp 783.500 dari belanja barang yang masih dibayar berupa biaya langganan air
2. Rp 10.397.872 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan listrik
3. Rp 7.106.645 dari belanja barang yang masih dibayar berupa langganan telepon

- ✓ Pada Tahun Anggaran 2024 BPSPL telah menerapkan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan serta telah memiliki 5 akun signifikan diantaranya :

1. Akun 111611 : Kas di Bendahara Pengeluaran

Transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan uang persediaan tunai, pencatatan penarikan dan pertanggungjawaban uang persediaan tunai, rekonsiliasi internal, pencatatan transaksi uang persediaan KKP, pelaporan kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan serta pengungkapan kas di Bendahara Pengeluaran pada Catatan atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya diantaranya adanya perbedaan pencatatan Uang Persediaan antara Pengelola Keuangan/Penanggungjawab Kegiatan dan BP, Adanya kesalahan pencatatan kodefikasi (KRO/RO/akun/ komponen/sub komponen/detail akun).

2. Akun 425259 : Pendapatan Perizinan Lainnya

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan tagihan/billing pada Aplikasi SIMPONI, Pelaporan PNBPN terkait Pendapatan Perizinan Lainnya dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya Adanya Kesalahan pencatatan nilai tagihan pada Aplikasi SIMPONI, Terdapat selisih nilai PNBPN antara Aplikasi SAKTI modul Bendahara dengan Modul GLP serta Adanya informasi yang kurang memadai terkait Pendapatan Perizinan Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan

3. Akun 117124 : Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Masyarakat

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah penginputan atau Pencatatan transaksi belanja barang persediaan, Pelaporan Persediaan Peralatan dan Mesin Yang Diserahkan Ke Masyarakat dalam Laporan Keuangan dan Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan. Resiko utamanya adalah Dokumen sumber belum dicatat, terdapat kesalahan penginputan kode barang, nilai persediaan, volume, tanggal dan nomor SP2D, kode MAK dan jenis persediaan, terdapat ketidaksesuaian rincian persediaan yang diinput dengan rincian persediaan pada lampiran BAST, Terdapat barang persediaan yang dikeluarkan dari buku persediaan sebelum atau tanpa dokumen BAST dari KPB kepada penerima bantuan. Untuk tahun anggaran 2023 BPSPL Denpasar akan memberikan Persediaan Peralatan dan Mesin yang akan diserahkan kepada Masyarakat di 2 lokasi yaitu di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Buleleng.

4. Akun 132111 : Peralatan dan Mesin

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah pencatatan barang Sesuai Berita Acara Serah Terima, pendetailan barang, pelaporan aset dan pengungkapan pada CaLK. Resiko utamanya diantaranya kode barang pada SAKTI modul komitmen berbeda dengan SAKTI modul aset, Perbedaan antara spesifikasi (jumlah dan jenis) barang yang diterima dengan dokumen kontrak, perbedaan antara saldo neraca aplikasi SAKTI modul GLP dengan modul ase

5. Akun 117111 : Barang Konsumsi

Kegiatan transaksi yang dikendalikan dalam akun ini adalah mengendalikan belanja barang persediaan dalam bentuk barang konsumsi agar penatausahannya sesuai dengan dokumen sumber sehingga tidak ada perbedaan antara saldo aplikasi sakti persediaan dengan modul GLP dan membentuk laporan keuangan yang memadai.

- ✓ Alokasi Anggaran Belanja Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Denpasar sebesar Rp **18.095.987.000** yang terdiri dari 3 (tiga) sumber dana yakni Rupiah Murni sebesar Rp 14.510.987.000, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 1.660.000.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.925.000.000. Untuk rincian anggaran belanjanya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No	Satker	Nama Satker	Sumber Dana	Periode	Belanja			Belanja			Belanja		
					Pegawai			Barang			Modal		
					Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Rupiah Murni	12	7,164,000,000	7,138,937,476	99.65	6,842,987,000	6,608,861,097	96.58	504,000,000	503,248,590	99.85
2			Pinjaman Luar Negeri	12	-	-	-	1,315,000,000	1,313,173,604	99.86	345,000,000	343,080,000	99
3			Penerimaan Negara Bukan Pajak	12	-	-	-	1,865,000,000	1,816,529,608	97.40	60,000,000	60,000,000	100

- ✓ Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada satker BPSPL Denpasar, Ditjen PKRL - Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu: Prioritas Nasional (PN) VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan pagu mencapai Rp 4.565.000.000 dan realisasi sebesar Rp 4.359.397.400 rincian sebagaimana berikut :

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				Prioritas Nasional (PN)		
								Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini	
													RVRO	PCRO (%)		RVRO	PCRO (%)
1	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	103207	12	2362	REB002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1,340,000,000	1,326,604,341	99.0003	5	Jenis	5	2	5	100	PN
2				12	4346	QDD001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	500,000,000	493,520,173	98.704	2	Kelompok Masyarakat	0	1	2	100	PN
3				12	2362	PEC001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70,000,000	59,587,307	85.1247	1	Kesepakatan	0	5	1	100	PN
4				12	2363	PBW002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	225,000,000	190,069,730	84.4754	1	Rekomendasi Kebijakan	1	5	1	100	PN
5				12	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1,100,000,000	1,039,542,990	94.5039	1	Rekomendasi Kebijakan	1	5	1	100	PN
6				12	2362	UBA001	Pemerintah daerah yang difasilitasi pemusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	180,000,000	175,949,069	97.7495	2	Daerah(Prov/Kab/Kota)	2	1	2	100	PN
7				12	2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50,000,000	46,770,665	93.5413	1	Rekomendasi Kebijakan	0	5	1	100	PN
8				12	2362	REB001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	700,000,000	643,327,962	91.904	5	Jenis	5	5	5	100	PN
9				12	2362	QEH001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400,000,000	384,025,163	96.0063	3	Kelompok Masyarakat	0	1	3	100	PN

- ✓ Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar pada Periode Tahun 2024 sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Satuan Kerja	: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477419	2362 - PBW Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50,000,000	46,770,665	93.54	1	1	Rekomendasi Kebijakan	0	
	2362 - PEC Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70,000,000	59,587,307	85.12	1	1	Kesepakatan	100.00	
	2362- QEH Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	500,000,000	493,520,173	98.70	2	2	Kelompok Masyarakat	100.00	
	2362- REA Oceans for Prosperity Project - Lautra	400,000,000	384,025,163	96.01	3	3	Kelompok Masyarakat	0.00	
	2362- REB 001 Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	1,660,000,000	1,656,253,604	99.77	277073	277073	Hektar	100.00	
	2362- REB 002 Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	700,000,000	643,327,962	91.90	5	5	Jenis	100.00	
	2362- SCC Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan	1,340,000,000	1,326,604,341	99.00	5	5	Jenis	100.00	
	2362 - UBA Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000	199,337,003	99.67	25	25	Orang	100.00	
	4346 Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	180,000,000	175,949,069	97.75	2	2	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	100	
	2363 - PBW Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	1,100,000,000	1,039,542,990	94.50	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	2366 - PBT Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	225,000,000	190,069,730	84.48	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100.00	
	2367 - CAN Perangkat Pengolah Data dan Informasi	90,170,000	90,000,000	99.81	8	8	Unit	100.00	
	2362 - EBA 956 Layanan BMN	85,000,000	84,903,783	99.89	9	9	Layanan	100.00	
	2367 - EBA 957 Layanan Hukum	315,000,000	314,751,880	99.92	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	25,000,000	20,517,002	82.07	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	20,000,000	19,669,746	98.35	1	1	Layanan	100.00	
	2362 - EBA 962 Layanan Umum	146,826,000	126,371,038	86.07	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBA994 Layanan Perkantoran	10,085,161,000	10,057,683,681	99.73	1	1	Layanan	100.00	
	2367 - EBB 951 Layanan Sarana Internal	313,830,000	313,422,590	99.87	92	92	Unit	100.00	
	2367 - EBC Layanan Manajemen SDM	220,000,000	206,575,150	93.90	60	60	Orang	100.00	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100,000,000	88,845,908	88.85	1	1	Dokumen	100.00	
	2367 - EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	85,000,000	82,952,743	97.59	1	1	Dokumen	100.00	
	2367 - EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	185,000,000	163,526,654	88.19	1	1	Dokumen	100.00	

LAMP IRAN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032

UNIT ORGANISASI : 07

WILAYAH/PROVINSI : 2200

SATUAN KERJA : 477419

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

BALI

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl. Cetak 10/07/2024 5:33 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	955,243	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	665,000	0
0.0	131111	Tanah	12,602,880,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,624,287,162	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,447,657,922	0
0.0	134112	Irigasi	284,691,000	0
0.0	134113	Jaringan	17,425,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,610,454,541
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	436,119,699
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	227,752,800
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	17,425,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	16,942,651
0.0	391111	Ekuitas	0	18,669,866,636
JUMLAH			22,978,561,327	22,978,561,327

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR 477419

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	950,000,000	3,035,051,977	2,085,051,977	319.48	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359.09
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	950,000,000	3,035,051,977	2,085,051,977	319.48	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359.09
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	950,000,000	3,035,051,977	2,085,051,977	319.48	850,000,000	3,052,288,384	2,202,288,384	359.09
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	18,095,987,000	17,783,830,375	(312,156,625)	98.27	14,073,397,000	13,678,924,464	(394,472,536)	97.2
1. Belanja Pegawai	7,164,000,000	7,138,937,476	(25,062,524)	99.65	6,168,397,000	6,161,254,472	(7,142,528)	99.88
2. Belanja Barang	10,022,987,000	9,738,564,309	(284,422,691)	97.16	7,532,000,000	7,148,119,992	(383,880,008)	94.9
3. Belanja Modal	909,000,000	906,328,590	(2,671,410)	99.71	373,000,000	369,550,000	(3,450,000)	99.08
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR 477419

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	18,095,987,000	17,783,830,375	(312,156,625)	98.27	14,073,397,000	13,678,924,464	(394,472,536)	97.2
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

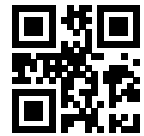
FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

GETREDA MELSINA HEHANUSSA
NIP. 197503032002122003



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	469,400	955,243	(485,843)	(50.86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,347)	0	(2,347)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	467,053	955,243	(488,190)	(51.11)
Persediaan	1,604,250	665,000	939,250	141.24
JUMLAH ASET LANCAR	2,071,303	1,620,243	451,060	27.84
ASET TETAP				
Tanah	14,021,264,000	12,602,880,000	1,418,384,000	11.25
Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	4,624,287,162	1,164,099,706	25.17
Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	5,447,657,922	(1,404,296,222)	(25.78)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	302,116,000	302,116,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,239,732,660)	(4,291,752,040)	(947,980,620)	22.09
JUMLAH ASET TETAP	18,915,395,908	18,685,189,044	230,206,864	1.23
JUMLAH ASET	18,917,467,211	18,686,809,287	230,657,924	1.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
JUMLAH KEWAJIBAN	18,288,017	16,942,651	1,345,366	7.94
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH EKUITAS	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH EKUITAS	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,917,467,211	18,686,809,287	230,657,924	1.23

Keterangan :

FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI



GEORGEA MELSINA HEHANUSSA

NIP 197503032002122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	469,400	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	2,347
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,604,250	0
0.0	131111	Tanah	14,021,264,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,788,386,868	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,043,361,700	0
0.0	134112	Irigasi	284,691,000	0
0.0	134113	Jaringan	17,425,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,456,074,335
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	500,521,725
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	265,711,600
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	17,425,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	18,288,017
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,783,830,375
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,035,051,977	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,787,000
0.0	391111	Ekuitas	0	18,669,866,636
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	9,871,792
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,390,720
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,222,695,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	1,798,911,256
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	955,243
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,099,758
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,307,744,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,380	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	118,795,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,994,994	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	238,120,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	15,599,055	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	105,443,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	255,115,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	53,635,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	123,316,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,120	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,329,360	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,665,872	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,940,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,662,640	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	14,411,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	155,700,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,499,280,177	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	158,901,081	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	466,004,489	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,696,420	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,912,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	242,402,667	0
3.0	521211	Beban Bahan	417,509,437	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	216,604,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,077,832	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	135,839,203	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	185,171,652	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	111,520,962	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,294,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	679,975,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	297,530,582	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	729,941,874	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248,906,926	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201,362,304	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,575,713,730	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	166,609,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,975,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,511,610,440	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	568,899,678	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,922,040	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	37,958,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	92,820,917	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299,021,590	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	2,347	0
JUMLAH			44,765,430,804	44,765,430,804

Keterangan :
FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

SETYEDA MELSINA HEHANUSSA
NIP 197503032002122003



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,027,996,976	3,042,026,022	(14,029,046)	(0.461)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,139,892,719	6,160,300,732	979,591,987	15.902
Beban Persediaan	92,820,917	90,232,633	2,588,284	2.868
Beban Barang dan Jasa	3,631,481,118	2,602,682,166	1,028,798,952	39.528
Beban Pemeliharaan	450,269,230	445,798,808	4,470,422	1.003
Beban Perjalanan Dinas	5,264,908,170	3,812,009,935	1,452,898,235	38.114
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	299,021,590	198,407,547	100,614,043	50.711

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI
SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 2:33 AM
Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	694,780,518	610,104,874	84,675,644	13.879
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,347	0	2,347	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	17,573,176,609	13,919,536,695	3,653,639,914	26.248
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14,545,179,633)	(10,877,510,673)	(3,667,668,960)	33.718
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(2,582,051)	2,582,051	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	8,555,999	(8,555,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	11,138,050	(11,138,050)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,055,001	1,767,916,363	(1,760,861,362)	(99.601)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,055,001	1,767,916,363	(1,760,861,362)	(99.601)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,055,001	1,765,334,312	(1,758,279,311)	(99.6)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.546
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.546

Keterangan :
FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025

Peranggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI



[Handwritten signature]

GETRED MELSINA HEHANUSSA
NIP. 197503032002122003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2200) BALI

SATUAN KERJA : (477419) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Tgl Data : 08/05/25 7:23 AM

Tgl Cetak : 08/05/25 10:39 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,669,866,636	17,155,406,917	1,514,459,719	8.83
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,538,124,632)	(9,112,176,361)	(5,425,948,271)	59.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,871,792	0	9,871,792	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	9,871,792	0	9,871,792	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	14,757,565,398	10,626,636,080	4,130,929,318	38.87
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	229,312,558	1,514,459,719	(1,285,147,161)	(84.86)
EKUITAS AKHIR	18,899,179,194	18,669,866,636	229,312,558	1.23

Keterangan :

FINAL

GIANYAR, 8 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI



GETUT DA MELSINA HEHANUSSA

NIP. 197503032002122003

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202412477419001
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	4,035,295	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		4,035,295

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Kantor Denpasar satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2024

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP


 Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar


 Getreda Melsina Hendarussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP


 Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202412477419002
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	2,668,750	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		2,668,750

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Hallo satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2024

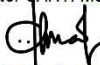
Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

 Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar

 Getreda Melsina Helranussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

 Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202412477419003
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	402,600	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		402,600

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Telepon Wilker Banyuwangi satker BPSPL Denpasar Bulan Desember 2024

Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

31 Desember 2024

Disetujui oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar

Gerda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
 WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
 NO DOKUMEN : 202412477419004
 TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	10,397,872	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		10,397,872

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Listrik BPSPL Denpasar Bulan Desember 2024

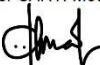
Dibuat oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

 Ina Cahyaningtyas, S.Pi



Disetujui oleh :
 Kepala BPSPL Denpasar

 Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
 Operator SAKTI Modul GLP

 Ina Cahyaningtyas, S.Pi

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03207 DIREKTORAT JENDERAL PRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202412477419005
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 14 ☐ | Piutang Jangka Panjang |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 15 ☐ | Koreksi Lainnya |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 16 ☐ | Piutang Jangka Pendek |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 7 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 19 ☐ | Koreksi Beban-Aset |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 21 ☐ | Kas Lainnya di BLU |
| 10 ☐ | Kas Di Bandahara Pengeluaran | 22 ☐ | Uang Muka Bekanja |
| 11 ☐ | Koreksi Antar Beban | 25 ☐ | Hibah Langsung |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	783,500	
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		783,500

URAIAN PENYESUAIAN

Akrual Langganan Air BPSPL Denpasar Bulan Desember 2024

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi

31 Desember 2024
Disetujui oleh :
Kepala BPSPL Denpasar

Getreda Molsina Hehenussa, S.Pi, M.Si

Direkam oleh :
Operator SAKTI Modul GLP

Ina Cahyaningtyas, S.Pi



**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
USULAN KOREKSI MANAJEMEN (KKP DAN KEMENKEU)**

ESELON I : 07 DITJEN PKRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202412477419006
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | |
|---|--|
| 1 ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ Penyisihan Piutang | 15 ☐ Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ Penghapusan Piutang | 16 ☒ Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ Penyusutan | 17 ☐ Transfer Masuk |
| 8 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan | 18 ☐ Transfer Keluar |
| 9 ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | 19 ☐ Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ Persediaan | 20 ☐ Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	469,400	
2	K	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		469,400

URAIAN PENYESUAIAN

Koreksi Internal : Pencatatan Piutang atas pengembalian belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota atas Kegiatan Lautra Tahun 2024 yang belum dicatat pada periode 13 berdasarkan Hasil Reviu Itjen/rekomendasi Unit E1

Gianyar, 31 Desember 2024

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP


Ina Cahyaningtyas

Diverifikasi oleh:
Kasubbag Umum


Anang Tri Jayanto M

Mengetahui,

Ketua Timja PKBMN
Setditjen PKRL

Ketua Timja APK
Biro Keuangan

Ony Satiti

Arifin Syam



Disetujui oleh :
Kepala Satker


Getreda Melsina Hehanussa

Ketua Tim Reviu LK
dari Inspektorat Mitra

**FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
USULAN KOREKSI MANAJEMEN (KKP DAN KEMENKEU)**

ESELON I : 07 DITJEN PKRL
WILAYAH : 2200 PROVINSI BALI
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 477419 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
NO DOKUMEN : 202412477419007
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2024 / SEMESTER II TA 2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☒ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bendahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	2,347	
2	K	116212	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		2,347

URAIAN PENYESUAIAN

Koreksi Internal : Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota yang belum dicatat pada periode 13 berdasarkan hasil pemeriksaan itjen bulan Januari 2025.

Gianyar, 31 Desember 2024

Dibuat oleh :
Operator SAKTI Modul GLP


Ina Cahyaningtyas

Diverifikasi oleh:
Kasubbag Umum


Anang Tri Jayanto M

Mengetahui,

Ketua Timja PKBMN
Setditjen PKRL

Ony Satiti

Ketua Timja APK
Biro Keuangan

Arifin Syam



Ketua Tim Reviu LK
dari Inspektorat Mitra